



ATURAN BARU: Siswa kelas VI mengikuti PTM di SD Negeri Keputran 7A, Patehan, Kraton, Jogja (3/1). Menyusul maraknya kasus Omicron, PTM di Jogjakarta kembali dibatasi menjadi 50 persen dan dikembalikan ke blended learning guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Skema Pembelajaran Kembali ke Blended Learning

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen di Jogjakarta baru berlangsung seminggu. Kini, kapasitas kembali dibatasi menjadi 50 persen dan dikembalikan ke *blended learning*. Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja Herce Poerwadi (HP) menjelaskan, pembelajaran kembali disesuaikan dengan skema *hybrid*. Atau gabungan antara pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan luring. Untuk meminimalisir penyebaran virus korona di lingkungan sekolah.

Kebijakan ini berlaku untuk jenjang SD dan SMP di Pemkot Jogja sejak kemarin (2/2). Dia pun belum bisa memastikan, sampai kapan PTM 50 persen akan dilaksanakan. Sebab, harus menyesuaikan dan melihat perkembangan kasus yang ada. Hal ini sebagai antisipasi merebaknya sejumlah kasus yang akan bertambah. Terlebih jika probable varian Omicron yang diklaim meningkat. "Maka kita mengantisipasi merebaknya jumlah kasus yang akhir-akhir ini makin kelihatan," jelas Wakil Wali Kota Jogja itu. Tidak hanya dari pemerintah dan sekolah, antisipasi juga perlu dilakukan oleh keluarga atau orang tua siswa. Dengan mengontrol kegiatan anak selama beraktivitas di luar sekolah. Sehingga, PTM yang kualitasnya telah diturunkan 50 persen, tetap berjalan lancar. "Karena proses di rumah dan sekolah harus berjalan beriringan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan

(Disdik) Kabupaten Sleman Erj Widaryana menuturkan, aturan serupa juga mulai diberlakukan kemarin. Dengan kapasitas siswa di tingkat TK/PAUD, SD, dan SMP, dirurunkan 50 persen. Aturan baru ini tertuang dalam surat edaran nomor 421/0634. Padahal, PTM 100 persen baru terlaksana selama dua pekan. "Pemberlakuan PTM 50 persen, berdasarkan instruksi Gubernur DIJ sampai waktu yang belum ditentukan," ungkap Ery.

Orang Tua Berharap Kebijakan Tidak Berlangsung Lama
 Kebijakan ini menuai respons dari orang tua siswa. Ila Hapsari, 36, misalnya. Ibu rumah tangga asal Kalasan ini mengaku sedikit keberatan terhadap kebijakan baru PTM. Pasalnya PTM 100 persen dinilai mampu membangkitkan semangat belajarnya. Terlebih dengan pertemuan seluruh siswa, sehingga menumbuhkan kompetisi dalam pembelajaran. "Anak saya lebih bersemangat bila dibandingkan saat pembelajaran daring," ucapnya. Ia berharap, aturan ini berlangsung tidak lama. Sehingga tidak terjadi *lost generation*. Sebab, putranya yang duduk di bangku kelas VI sangat membutuhkan pendampingan guru untuk memahami materi pembelajaran. Mengingat tidak semua orang tua menguasai dan mampu mendampingi belajar anak dengan maksimal. Dia pun membandingkan apabila anak

belajar di rumah. Sebagian besar waktu terkis untuk bermain. Sementara itu tidak semua orang tua dapat mengawasi *full time*. Apalagi bagi orang tua yang bekerja. Menurutnya, belajar di sekolah jauh lebih disiplin dibandingkan dengan belajar di rumah. "Dia (anakku, Red) senang kalau kelasnya dibikin separo, karena situasi kelas cenderung lebih tenang. Tetapi *nggak* enaknyanya, jam pelajarannya cuma sedikit sehingga *nggak* banyak materi yang disampaikan," ungkap Lia. Dia menantikan putra semata wayangnya itu.

Pada PTM 50 persen ini, lanjutnya, setiap siswa mendapatkan jatah tiga kali tatap muka dalam seminggu. Dengan jam belajar di sekolah maksimal enam jam. Menurutnya, pemerintah kabupaten juga perlu menyampaikan pertimbangan PTM 50 persen sampai kapan diberlakukan. Lalu, kriteria penentuan PTM 100 persen harus disampaikan lebih jelas dan tegas. Sebab dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri 2022 disebutkan, penghentian sementara satuan pendidikan se-kurang-kurangnya 14x24 jam apabila terjadi kluster penularan di lingkungan satuan pendidikan dan dengan angka *positivity rate* hasil ACF di atas lima persen. Kemudian surveilans ternyata bukan kluster PTM, atau angka *positivity* kurang dari lima persen, maka PTM terbatas hanya dihentikan. Pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi atau kon-

tak erat selama 5x24 jam. Minimal 80 persen satuan pendidikan telah menjalani vaksinasi dosis ke dua. Dan khusus usia lanjut maksimal sudah di vaksin 50 persen. "Saya lihat kabupaten Sleman telah memenuhi syarat itu. DIJ memang tidak dihentikan tapi diturunkan persentasenya, jadi tolong jelaskan apa kriterianya," ungkap Lia.

Kepala SMP Negeri 5 Jogja (Pawitkra) Siti Arina Budiastuti mengaku, para orang tua siswa menginginkan kapasitas PTM 100 persen. Namun, seluruhnya tetap menyambut baik dengan adanya kebijakan baru. "Kami mengikuti sesuai kebijakan, sambil menunggu kebijakan yang selanjutnya," katanya kepada *Radar Jogja*.

Skema pembelajaran yang dilakukan, menggunakan sistem pembelajaran *blended learning* 50 persen di rumah dan di sekolah. Dengan penerapan enam jam pelajaran setiap hari, atau setara dengan empat jam di sekolah. Adapun untuk seluruh kegiatan ekstrakurikuler, akan dilaksanakan secara daring. Serta kegiatan lain yang sifatnya berkerumun, ditiadakan. "Kami mohon pengertiannya kepada seluruh orang tua untuk menerima PTM 50 persen ini dan memohon agar para wali murid membimbing dan membesarkan anak-anak selama di rumah. Sehingga harapannya anak-anak tetap 100 persen belajar meskipun harus dengan cara *blended learning*," jabarnya. (wla/mel/eno/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005